

**FAKTOR-FAKTOR KETIDAKBERHASILAN IMPLEMENTASI PROGRAM  
SIDEKEM (SISTEM INFORMASI DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN  
PERDESAAN) DI KABUPATEN PEMALANG**

**Yulia Dwi Rahmawati, Maesaroh, Nina Widowati**

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Telpon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <https://www.fisip.undip.ac.id> email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)



**ABSTRACT**

*The implementation of the Village Information System (SID) through SIDEKEM is an innovation program that utilizes information and communication technology to support resource management at the regional and village levels in order to provide free and open village data information. The purpose of this study is to collect data and then analyze what factors have caused the unsuccessful implementation of SID through the SIDEKEM program in Pemalang Regency. The research method used in the research is descriptive qualitative, with data collection techniques of interviews and documentation. The results showed that the factors that caused the unsuccessful implementation of SIDEKEM in Pemalang Regency were the unavailability of specialized human resources who were competent to operate SIDEKEM, the lack of budget and facilities to support SIDEKEM operations, and there were problems of authority disputes in implementation. This has resulted in a very low level of village compliance with the established SOP. Researchers suggest that each village should have a dedicated human resource and DINPERMASDES should improve the quality of human resources through training for village administrators. In addition, impose sanctions on villages that do not implement SIDEKEM so that they can be motivated to meet the standards and objectives of the SIDEKEM program, and maximize the budget for operations in implementing the SIDEKEM program in Pemalang District. In addition, researchers also provide suggestions so that the SIDEKEM program can be reviewed regarding the effectiveness of the program to continue to implement.*

**Keywords: Implementation, Village Information System, SIDEKEM**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Indonesia adalah suatu negara yang terdapat beragam lembaga pemerintah yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sebagai sarana untuk memperbaiki transparansi informasi publik.

Pengaruh dari kemajuan teknologi informasi terhadap birokrasi pemerintah mengakibatkan diberlakukannya Pasal 2 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam rangka membantu meningkatkan

peran Pemerintah Desa berkewajiban untuk mengembangkan SID (Sistem Informasi Desa). Sistem Informasi Desa (SID) merupakan program yang bertujuan untuk menghidupkan kembali kehidupan desa dengan melengkapi kekurangan tampilan atau profil desa yang kurang detail untuk mencerminkan keunikan informasi desa.

Mengacu pada undang-undang tersebut, pemerintah kabupaten pemalang menciptakan inovais implementasi SID melalui program SIDEKEM yang diatur dalam peraturan bupati nomor 89 tahun 2017 tentang penerapan SIDEKEM (sistem informasi desa dan pengembangan kawasan perdesaan) di Kabupaten Pemalang. SIDKEM merupakan salah satu wadah pemanfaatan teknologi informasi untuk mengelola dan memberikan informasi yang tepat dan akurat kepada masyarakat.

**Tabel 1.1 Data Perangkat Desa yang Mengakses Website SIDEKEM**

Tahun	Persentase Desa yang Mengakses
2019	0%
2020	54,40%
2021	39,27%
2022	39,35%

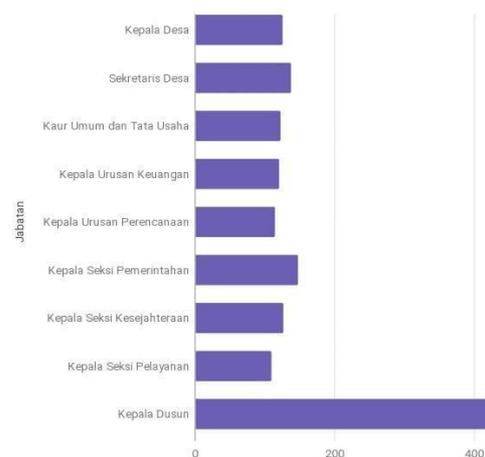
Sumber: Kantor PUSPINDES Kabupaten Pemalang

Berdasarkan tabel 1.1 maka dapat diketahui bahwa pada tahu 2019 persentase terbesar yang mengakses

website SIDEKEM hanya 0% karena terdapat perbaikan sistem. Pada tahun 2020 persentase terbesar yang mengakses website SIDEKEM mencapai 54,40%, kemudian pada tahun 2021 terdapat penurunan menjadi 39,27%, dan pada tahun 2022 terdapat sedikit kenaikan menjadi 39,35%. Pemerintah Desa Di Kabupaten Pemalang dalam implementasi program SIDEKEM diwajibkan untuk mengelola dan menyebarluaskan SIDEKEM dengan menyediakan dan mendistribusikan informasi secara berkala, tersedia setiap saat serta akurat. Dapat dilihat bahwa pada Perangkat Desa yang seharusnya mengakses website SIDEKEM belum memenuhi target 100%.

**Gambar 1.1 Data Perangkat Desa yang Mengisi SIDEKEM Tahun 2022**

Chart Statistik Data Perangkat Desa Kabupaten Pemalang. (Sumber Data Desa)



Sumber : [puspindes.pemalangkab.go.id](http://puspindes.pemalangkab.go.id)

Gambar 1.1 menerangkan dari jumlah 211 Desa di Kabupaten Pemalang mayoritas yang mengisi data di akun SIDEKEM masih belum tercapai 100% dari

target yang telah ditetapkan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis dengan melihat beberapa website desa tersebut menunjukkan bahwa website desa yang idealnya menampilkan tentang informasi dasar mengenai desa seperti profil desa, data pemerintahan desa, data kependudukan, data monografi, berita desa, peta desa, transparansi anggaran desa, dan potensi desa, dan sebagainya. Namun demikian belum semua Desa menampilkan informasi tersebut secara lengkap sesuai berdasarkan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan, selain itu tingkat update atau keterbaruan informasi juga masih kurang dan belum dilakukan secara konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi program SIDEKEM di Kabupaten Pematang Jaya belum optimal. Belum terlihat keberhasilan penyampaian informasi publik melalui pemanfaatan teknologi informasi. Penulis menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan implementasi SID melalui SIDEKEM di Kabupaten Pematang Jaya.

### **B. Rumusan Masalah**

Apakah faktor-faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan implementasi program SIDEKEM di Kabupaten Pematang Jaya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan

implementasi program SIDEKEM di Kabupaten Pematang Jaya.

### **D. Metode Penelitian**

Menurut Sugiyono (2016:9) metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat post positivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif agar dapat menggambarkan, meringkas, dan menganalisis data yang diperoleh berdasarkan hasil pengamatan serta wawancara terkait fenomena yang terjadi pada implementasi program SIDEKEM di Kabupaten Pematang Jaya.

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur dan terbuka untuk memperoleh tanggapan yang luas. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu arsip milik PUSPINDES, misalnya grafik persentase perangkat desa yang mengakses website SIDEKEM.

### **E. Kerangka Teori**

#### **Administrasi Publik**

Chandler dan Plano dalam Pasolong (2016:7) mengemukakan bahwa Administrasi Publik merupakan seni dan

ilmu (*art and science*) yang ditujukan untuk mengatur “public affairs” dan melaksanakan berbagai tugas yang ditentukan. Administrasi Publik sebagai disiplin ilmu bertujuan untuk memecahkan masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama dibidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan.

### **Kebijakan Publik**

Mulyadi (2015:37), menyatakan bahwa kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi kesalahan tertentu melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang mempunyai wewenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan, berlangsung dalam satu kebijakan tertentu.

### **Implementasi Kebijakan**

Menurut Wibawa (Tahir, 2014:58), tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. Keseluruhan proses penetapan kebijakan baru bisa dimulai apabila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah rinci, program telah dirancang dan juga sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut.

### **Model Kebijakan**

Model Implementasi kebijakan publik menurut George C. Edwards III dalam

Agustino (2016) diidentifikasi terdapat empat faktor utama yang menentukan implementasi kebijakan dalam kebijakan publik yaitu:

#### a. Komunikasi

Komunikasi kebijakan merupakan suatu proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan publik kepada para pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan memahami kebijakan dengan baik.

#### b. Sumber Daya

Pelaksanaan kebijakan hanya dapat terjadi jika tersedia sumber daya yang cukup untuk mendukung implementasi. Sumber daya yang dibutuhkan termasuk tenaga kerja dan keuangan. Implementasi kebijakan hanya dapat berhasil jika sumber daya yang diperlukan tersedia untuk mendukung seluruh aktivitas yang terlibat.

#### c. Disposisi

Sikap atau disposisi dari pelaksana kebijakan juga menjadi faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan. Untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang efektif, pelaksana kebijakan harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan kebijakan (Kania et al., n.d.).

#### d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang tidak kondusif dapat menghambat kebijakan dan mengurangi efektivitas sumber daya karena kebijakan memerlukan kerjasama banyak pihak.

## **Sistem Informasi Desa**

Wilhem Wau (dalam Sulistyowati, Fadjarini dan Dibyorin Mc. Canra R, 2013) menjelaskan bahwa Sistem Informasi Desa (SID) merupakan informasi yang dioperasikan melalui perangkat teknologi informasi dan aplikasi perangkat lunak oleh perangkat desa.

## **HASIL PENELITIAN**

Implementasi kebijakan merupakan tahap di mana kebijakan tersebut dilaksanakan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun, menurut Suharno (2013:169), keberhasilan implementasi suatu kebijakan tidak selalu terjamin karena adanya berbagai faktor yang dapat mempengaruhinya. Seperti pada implementasi kebijakan SID melalui SIDEKEM di Kabupaten Pematang Jaya yang dianggap belum berhasil karena hanya 40% desa di Kabupaten Pematang Jaya yang telah menerapkan SIDEKEM. Adapun faktor2 implementasi kebijakan menurut G. Edward III yaitu sumber daya, komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi yang dijelaskan sebagai berikut.

### **a. Sumber Daya**

Edward (Indiahono, 2017:31) memaparkan bahwa sebuah kebijakan harus didukung berbagai sumber yang dapat menopang dan mendukung agar kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk menilai sejauh mana sumber daya mempengaruhi

implementasi program SIDEKEM di Kabupaten Pematang Jaya, digunakan indikator-indikator tertentu, yaitu:

#### **1. Sumber Daya Manusia**

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor terpenting dalam implementasi kebijakan. Diperlukan SDM yang memadai dengan keahlian dan kemampuan sesuai yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas yang telah ditentukan oleh kebijakan itu sendiri.

Dari hasil wawancara diketahui bahwa dalam implementasi SIDEKEM di Kabupaten Pematang Jaya masih terdapat kendala pada SDM terutama dalam tenaga ahli desa atau admin desa selaku pelaksana kebijakan. Hingga saat ini hanya tercatat 18% desa yang telah mengeluarkan SK untuk admin desa, hal tsb dapat diketahui masih banyak sekali desa yang belum memiliki SDM secara khusus untuk mengoperasikan SIDEKEM. Banyak desa yang memilih menunjuk perangkat desa untuk merangkap menjadi admin desa yang mengakibatkan implementasi program SIDEKEM menjadi terhambat karena perangkat desa lebih memilih untuk lebih memprioritaskan tugasnya. Selain itu, perangkat desa yang merangkap menjadi admin desa juga memiliki keterbatasan untuk mengisi website sidekem karena membutuhkan pemahaman mengenai teknologi informasi agar dapat mengoperasikan menu yang ada di website

sidkem. keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh perangkat desa mengakibatkan kesulitan dalam mencari informasi dan mengelola data informasi untuk dipublikasikan.

## 2. Sumber Daya Dana

Edward III dalam Tahir (2014:66) menyatakan bahwa keterbatasan sumber daya anggaran dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan mengakibatkan disposisi bagi para pelaku kebijakan rendah. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa dalam program SIDEKEM belum memiliki anggaran khusus untuk operasionalisasi atau pengelolaan SIDEKEM di tingkat desa terutama anggaran untuk admin desa. hingga saat ini belum ada nomenklatur dan kode rekening khusus untuk anggaran admin desa. Dalam implementasi SIDKEM seharusnya desa dapat menganggarkan anggaran pengelolaan SIDKEM melalui APBDes ataupun PADes, namun berdasarkan hasil wawancara dengan PUSPINDES menyatakan bahwa masih banyak desa yang ragu untuk memasukan anggaran SIDEKEM kedalam APBDes karena banyak desa yang meragukan apakah anggaran tersebut dapat dimasukan di SPJ APBDes. Selain itu, alasan masih banyak desa yang tidak menggunakan PADes dikarenakan masih banyak pula desa di Kabupaten Pematang Jaya yang belum memiliki PADes yang mencukupi. Untuk

itu desa yang tidak memiliki anggaran untuk admin desa mereka memanfaatkan perangkat desa untuk meangkap menjadi admin desa yang mengakibatkan tidak optimalnya implementasi SIDKEM.

## 3. Fasilitas

Fasilitas adalah elemen kunci pada pelaksanaan kebijakan, jika tidak ada dukungan fasilitas (infrastruktur dan peralatan), maka kebijakan tersebut akan gagal. Salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan adalah fasilitas yang memadai seperti jaringan internet, seperti gedung, komputer, maupun perlengkapan lain seperti kursi dan meja tentunya setiap desa sudah memenuhi hal tersebut. Adanya perbedaan kondisi tersebutlah yang dapat mengakibatkan implementasi SIDEKEM di Kabupaten Pematang Jaya belum bisa berjalan dengan optimal di seluruh desa. Selain itu masih terdapat kendala jaringan karena kondisi infrastruktur jaringan di setiap desa yang berbeda. Pihak PUSPINDES juga mengakui bahwa belum semua kantor desa di Kabupaten Pematang Jaya telah memiliki jaringan internet yang memadai.

## 4. Kewenangan

Kewenangan merujuk pada otoritas atau legitimasi yang diberikan kepada pihak pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2017 menyebutkan

Pemerintah Desa memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan petugas pengelola SIDEKEM di tingkat Desa. Hingga saat ini dari 211 Desa di Kabupaten Pemalang hanya tercatat 18% Desa yang telah mengeluarkan SK untuk admin desa. Hal tersebut dapat diartikan bahwa masih banyak Desa di Kabupaten Pemalang yang tidak memiliki admin khusus dalam penerapan SID. Berdasarkan hasil wawancara terdapat permasalahan sengketa wewenang di salah satu desa. Sengketa ini karena adanya ketidakjelasan kewenangan yang disebabkan oleh pergantian pemimpin (kepala desa) yang merubah kewenangan untuk bertindak dalam satu bidang urusan pemerintahan yang sebelumnya sudah berjalan.

#### **b. Komunikasi**

George C. Edwards III, dalam Agustino (2016), menjelaskan bahwa komunikasi kebijakan adalah proses di mana pembuat kebijakan (komunikator) memberikan informasi kebijakan kepada pelaksana kebijakan (komunikan) sehingga pelaksana kebijakan dapat mengetahui isi, tujuan, arah, dan kelompok sasaran kebijakan. Edward III (Leo Agustino, 2016 : 137) menyatakan bahwa dalam komunikasi terdapat hal penting yang yang harus diperhatikan untuk menjalankan suatu kebijakan, hal tersebut yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

#### **a. Transmisi**

Transmisi merupakan saluran komunikasi yang sesuai dan dapat mengarah pada implementasi kebijakan yang baik. Dengan transmisi komunikasi yang baik dapat memberikan saluran komunikasi yang akurat dan tidak menimbulkan kesalahpahaman, karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi (Agustino, 2014: 150-151). Pada penerapan SIDEKEM komunikasi yang terjalin dapat dikatakan cukup minim. Komunikasi formal hanya dilakukan dengan rapat 1 (satu) tahun 1 (satu) kali dan adanya pemberitahuan disampaikan melalui surat. Pada implementasi program SIDEKEM tingkat birokrasi yang ada dalam proses komunikasi beresiko adanya salah pengertian. Komunikasi yang diberikan oleh pihak DINPERMASDES melalui PUSPINDES kepada Perangkat Desa yaitu dengan melakukan sosialisasi yang dianggap masih pasif serta kurangnya pendekatan persuasif dalam implementasi program SIDEKEM sehingga kurang mendukung tercapainya tujuan dan mendorong partisipasi setiap Desa di Kabupaten Pemalang untuk menerapkan SIDEKEM. Komunikasi adalah proses yang kompleks dan rumit.

#### **b. Kejelasan**

Kejelasan adalah komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (*street-level bureaucrat*) yang harus dapat dipahami dan

tidak menimbulkan persepsi lain (jelas dan tidak ambigu) (Agustino, 2014:150-151). Pihak DINPERMASDES merasa bahwa informasi yang mereka berikan kepada pihak pelaksana di tingkat desa cukup jelas. Mereka menyatakan hal tersebut atas dasar bahwa pada saat diselenggarakannya pelatihan tidak terdapat pertanyaan lebih lanjut dari pihak operator desa sebagai pihak yang dilatih. Dari temuan penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi dalam pelatihan SIDEKEM dapat diterima dengan jelas, hanya saja hingga saat ini yang menjadi kendala yaitu konsistensi dari para admin desa dalam pengisian website SIDEKEM. Hal tersebut dikuatkan oleh pernyataan dari pihak desa yang peneliti wawancarai yaitu pihak Desa Sikasur dan Desa Randudongkal bahwa operator SID di tingkat desa merasa informasi yang diberikan dari pihak PUSPINDES pada saat pelatihan sudah cukup jelas meskipun intensitas pelatihan masih dinilai kurang intens.

### c. Konsisten

Konsistensi dalam komunikasi merupakan tatanan yang telah ditentukan dalam pelaksanaan komunikasi yang harus konsisten dan ditetapkan serta dijelaskan dengan jelas. Dalam aspek konsistensi komunikasi yang disampaikan oleh DINERMASDES dapat dikatakan sudah cukup baik. Komunikasi secara formal yang disampaikan oleh DINPERMASDES

kepada Perangkat Desa berlangsung selama 1 (satu) tahun 1 (satu) kali. Pihak DINPERMASDES merasa informasi yang mereka berikan kepada pihak operator atau admin SID di Tingkat Desa melalui pelatihan-pelatihan yang dilakukan sudah cukup konsisten dan tidak berubah namun dinilai masih kurang intensif dan persuasif untuk meningkatkan motivasi admin desa dalam mengisi website SIDEKEM

### c. Disposisi

Edward III dalam Misroji (2014:49) mendefinisikan disposisi sebagai sikap para implementator kebijakan memiliki peran penting dalam berhasilnya penerapan kebijakan. Disposisi juga menjadi faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan agar dapat berjalan lancar karena para implementator kebijakan harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya sehingga dapat berjalan sesuai ketentuan. Menurut Edward III (Leo, Agustino, 2016:139), terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan:

#### a. Efek disposisi.

Disposisi merupakan sikap para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan suatu kebijakan, Dampak sikap atau disposisi dari para pelaksana kebijakan dapat menghambat implementasi kebijakan jika SDM yang tersedia tidak dapat menerapkan kebijakan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan.

Secara umum pemerintah Desa di Kabupaten Pematang telah mengetahui tentang SIDEKEM, namun kesadaran Pemerintah Desa untuk melaksanakan Sistem Informasi Desa (SID) melalui SIDEKEM masih kurang. Seharusnya setiap Desa di Kabupaten Pematang memiliki data untuk dikelola dan dipublikasikan pada website SIDEKEM. Akibat rendahnya kesadaran akan pentingnya data dan publikasi data sebagai bentuk implementasi SID menjadi kendala dalam implementasi program SIDEKEM sehingga tidak berjalan dengan optimal. Pihak DINPERMASDES dalam hal ini tetap berupaya agar dapat meningkatkan kesadaran perangkat desa untuk melaksanakan sistem informasi desa sebagaimana mestinya melalui website SIDEKEM, selain itu konsistensi admin desa dalam pengisian data di website SIDEKEM juga perlu ditingkatkan agar terlaksana dengan optimal.

#### b. Insentif

Insentif adalah salah satu cara yang dapat memecahkan masalah mengenai disposisi kebijakan dengan manipulasi insentif. Berdasarkan hasil wawancara, hingga saat ini dalam implementasi program SIDEKEM belum ada anggaran khusus untuk admin desa. Terdapat beberapa Desa yang sudah menganggarkan biaya admin desa melalui APBDes maupun APBDes, namun masih banyak pula desa yang belum

menganggarkan dana untuk admin desa karena terdapat keterbatasan dana. Keterbatasan dana ini di berbagai desa ini berdampak tidak bisa memiliki admin khusus untuk menerapkan SID, sehingga banyak desa yang memanfaatkan perangkat desa untuk merangkap menjadi admin. Karena kebanyakan admin desa ini merupakan perangkat desa jadi mereka kurang termotivasi untuk melaksanakan SIDEKEM dengan optimal. Tidak adanya insentif dalam operasional aplikasi SIDEKEM berdampak pada keterbatasan SDM yang menyanggupi untuk menjadi admin desa. Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menemukan adanya penganggaran di beberapa desa namun dengan biaya yang minim yang mengakibatkan rendahnya kemauan untuk melaksanakan SIDEKEM dengan optimal.

#### d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah salah satu elemen yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan publik. Namun, susunan administrasi dapat mengakibatkan fragmentasi birokratik yang dapat menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan. Edward III Winarno (2014:206) menjelaskan bahwa terdapat dua ciri-ciri utama dari birokrasi, yaitu prosedur operasional standar (SOP) dan fragmentasi. SOP berkembang sebagai tanggapan internal atas keterbatasan waktu dan sumber daya yang ada pada pelaksanaan

serta untuk memastikan konsistensi dalam operasi organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Fragmentasi utamanya disebabkan oleh tekanan dari luar seperti komite legislatif, kelompok kepentingan, pejabat eksekutif, konstitusi negara, dan kebijakan yang mempengaruhi organisasi pemerintah.

#### 1. Standard operational procedure (SOP)

SOP merupakan dasar bagi setiap organisasi yang awalnya dikembangkan sebagai tanggapan internal terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya pelaksana, serta kebutuhan untuk memastikan konsistensi dalam operasi organisasi yang rumit dan tersebar luas (Winarno, 2014:206). SOP yang digunakan dalam implementasi program SIDEKEM mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2017. Dalam Perbup tersebut terdapat aturan-aturan yang harus dilaksanakan. Tugas Pemerintah Desa dalam menerapkan SIDEKEM adalah mengurus dan menyebarluaskan SIDEKEM sesuai dengan ketentuan yang ada. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, menurut pihak DINPERMASDES menyatakan bahwa hingga saat ini tingkat kepatuhan Desa dalam implementasi SIDEKEM hanya mencapai 40%, maka dapat diartikan masih banyak Desa yang belum sesuai dengan ketentuan Perbup dalam implementasi program SIDEKEM. Masih terdapat

banyak Desa di Kabupaten Pematang Jaya yang tidak mengisi website sidekem sesuai dengan peraturan, selain itu banyak pula Desa yang sudah mengisi tetapi tidak konsisten untuk memperbarui data sebagai informasi publik. Pihak Perangkat Desa Randudongkal juga menyatakan bahwa hingga saat ini di Desa Randudongkal terakhir kali pengisian website di tahun 2021, untuk 2022 dan seterusnya sudah berganti kewenangan jadi tidak berjalan dengan optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Perangkat Desa Sikasur juga menyatakan bahwa belum semua fitur yang ada di website SIDEKEM telah diisi sebagaimana mestinya oleh admin Desa Sikasur.

#### 2. Fragmentasi

Pemecahan tugas-tugas kebijakan di antara unit-unit organisasi disebut fragmentasi. Dampak negatif utama dari fragmentasi birokrasi adalah menghalangi koordinasi antara para birokrat karena adanya prioritas yang berbeda-beda dari lembaga-lembaga yang berbeda. Dalam program SIDEKEM sudah dijelaskan pihak-pihak pelaksana kebijakan dan bagaimana tanggung jawabnya melalui Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 89 Tahun 2017. Berdasarkan hasil wawancara yang terjadi di lapangan bahwa kewenangan yang tersebar tersebut menimbulkan hambatan implementasi SIDEKEM karena minimnya koordinasi selama proses implementasi,

bahkan ditemukan bahwa koordinasi hanya dilakukan oleh Puspindes dengan Kominfo hanya jika terjadi trouble atau masalah, selain itu koordinasi dengan pelaksana desa seperti Desa Sikasur dan Desa Randudongkal yang hanya dilakukan di awal peluncuran SIDEKEM. Diperlukan koordinasi dengan *stakeholder* lain agar dapat meningkatkan keberhasilan implementasi SIDEKEM

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Terdapat 4 faktor yang menjadi penyebab ketidakberhasilan dalam implementasi SIDEKEM di Kabupaten Pematang Jaya yaitu sumber daya, komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi yang dijelaskan sebagai berikut:

#### a. Sumber daya

Permasalahan utama dalam aspek sumber daya yaitu masih banyak desa yang belum memiliki SDM yang khusus dan berkompeten. Hingga saat ini hanya tercatat 18% desa yang telah mengeluarkan SK untuk admin desa. Sebagian besar Desa lebih memilih menunjuk perangkat desa untuk merangkap menjadi admin desa, hal ini berdampak implementasi SIDEKEM tidak optimal karena perangkat desa yang merangkap menjadi admin desa lebih memprioritaskan tugasnya. Selain itu, belum adanya anggaran khusus seperti upah untuk admin desa dan biaya operasional dalam pengumpulan data. Kemudian

fasilitas dalam implementasi SIDEKEM juga masih kurang memadai seperti masih terdapat kendala infrastruktur jaringan di setiap Desa yang berbeda-beda sehingga menghambat dalam implementasi program SIDEKEM.

#### b. Komunikasi

Berdasarkan aspek-aspek transmisi, kejelasan, dan konsistensi pelaksana kebijakan SIDEKEM di Kabupaten Pematang Jaya dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang diberikan oleh pihak DINPERMASDES kepada Perangkat Desa melalui sosialisasi sudah cukup jelas, namun dianggap masih pasif serta kurangnya pendekatan persuasif dalam mendorong partisipasi Desa untuk menerapkan SIDEKEM. Komunikasi melalui sosialisasi hanya dilakukan selama 1 (satu) tahun 1 (satu) kali saja, hal itu dianggap kurang menunjang para admin desa untuk dapat memahami dan mengimplementasikan SIDEKEM dengan optimal.

#### c. Disposisi

Aspek disposisi ini juga menjadi faktor penghambat implementasi SIDEKEM. Para pelaksana SIDEKEM terutama pihak desa dalam hal ini belum siap untuk mengimplementasikan SIDEKEM karena masih rendahnya kesadaran akan pentingnya data dan publikasi data. Selain itu adanya insentif yang sangat kecil

mengakibatkan rendahnya kemauan untuk melaksanakan SIDEKEM dengan optimal.

#### d. Struktur Birokrasi

Terdapat dua sifat utama birokrasi yaitu *Standard Operational Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Tingkat kepatuhan Desa terhadap SOP yang telah ditentukan hanya mencapai 40%, maka dapat diartikan masih banyak Desa yang belum sesuai dengan ketentuan Perbup dalam implementasi program SIDEKEM. Selain itu, kurang jelasnya pembagian wewenang terutama pada admin desa mengakibatkan sengketa wewenang dalam pelaksanaan SIDEKEM.

### **B. Saran**

Berdasarkan temuan di lapangan, peneliti memberikan saran dengan harapan implementasi program SIDEKEM di Kabupaten Pematang Jaya dapat berjalan dengan optimal, sebagai berikut:

#### a. Sumber Daya

Perlu adanya SDM khusus sebagai admin desa dan peningkatan kualitas SDM melalui kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis kepada admin desa yang mengelola SIDEKEM. Di setiap Desa diharapkan dapat meningkatkan akses jaringan internet dan mengoptimalkan anggaran operasional melalui dana Desa sehingga dapat mengantisipasi keterbatasan pelaksanaan di tingkat Kabupaten.

#### b. Komunikasi

Mengadakan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan Desa setiap triwulan

sekali untuk menciptakan komunikasi secara langsung yang baik dan menciptakan kesadaran akan kewajiban Desa untuk melaksanakan program SIDEKEM.

#### c. Disposisi

Menyelenggarakan kompetisi dalam pengelolaan SID melalui SIDEKEM agar para admin desa dapat termotivasi dan lebih aktif dalam memenuhi tujuan program SIDEKEM.

#### d. Struktur Birokrasi

Peneliti memberikan saran agar DINPERMASDES memberikan sanksi yang tegas terhadap Pemerintah Desa yang tidak mengisi SIDEKEM sesuai dengan ketentuannya dengan memberikan teguran melalui surat peringatan. Peneliti juga memberikan saran agar program SIDEKEM di Kabupaten Pematang Jaya ini dapat ditinjau kembali mengenai keefektifan program untuk tetap dilaksanakan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Deddy. Mulyadi.(2015) Studi Kebijakan Publik, dan Pelayanan Publik, Bandung : ALFABETA hlm 129-133
- Nugroho, Riant. (2014). *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

- Tahir, A. (2015). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bandung. CV Alfabeta.
- Anwar, A. N. R., & Sujai, I. I. (2020). Analisis Implementasi Sistem Informasi Desa Terintegrasi Di Kabupaten Pangandaran. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(4), 849-856.
- Arifah, U. (2018). Implementasi Sistem Informasi Desa Di Kabupaten Kebumen Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik. *PROSIDING SENASPOLHI*, 1(1).
- Hertati, D. (2020). Model Implementasi sistem informasi pemerintahan desa berbasis website bagi pemerintahan desa di Kabupaten Sidoarjo. *Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10(1). <https://doi.org/10.33005/jdg.v10i1.2049>
- Shomad, A. (2018). Implementasi Sistem Informasi Desa di Kabupaten Bekasi. *Jurnal AKP*, 8(2), 62–80.
- Sidiq, R. D. N., & Suwitri, S. (2015). Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kebumen (Kajian Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kebumen). *Journal of Public Policy and ...*, 20. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/22018%0Ahttps://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/download/22018/20263>
- Sulistyowati, Fadjarini dan Rusmala, Candra. 2013. Partisipasi Warga terhadap Sistem Informasi Desa. *Jurnal Komunikasi*. Vol. 2/No. 1/2013 : P. 1-10. Yogyakarta : ASPIKOM.
- Susanto, A., Rachmawanto, E. H., Mulyono, I. U. W., & Sari, C. A. (2021). Implementasi Sistem Informasi Desa (SID) untuk Peningkatan Layanan dan Keterbukaan Informasi di Desa Hulosobo, Kaligesing, Purworejo. *Abdimasku: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 105-110.